



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU TERHADAP KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR DI PT. CAPELLA CABANG
BANGKINANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SITI HASNAH MUSDALIFAH
11327200869**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Implementasi Kebebasan Berkontrak Dalam Penetapan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Merek Honda Di PT .Capella Cabang Bangkinang"*

Nama : SITI HASNAH MUSDALIFAH
 NIM : 11327200869
 Program Studi : Ilmu Hukum untuk di laksanakan dalam sidang Munaqasah

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

27 April 2020

Pekanbaru, 27 April 2020

Pembimbing Skripsi : M. M. Hum


MUSLIM, S. Ag., SH., M. Hum

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MERK HONDA DI PT. CAPELLA
CABANG BANGKINANG

Nama Panulis : SITI HASNAH MUSDALIFAH
NIM : 11327200869
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,
Tim Penguji

2020



1. Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Roni Kurniawan, SH., MH
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH
(Anggota Penguji)
4. Peri Pirmansyah, SH, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Hasnah Musdalifah, (2019): Implementasi Perjanjian Baku terhadap Kredit Kendaraan Bermotor di PT.Capella Cabang Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula konsumen baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh secara angsuran. Tercapainya suatu perjanjian yang sah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi realita yang terjadi perjanjian di PT. Capella cabang Bangkinang perjanjiannya dibuat baku sebelah pihak saja dari perusahaan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang dan apa kendala dalam implementasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang.

Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di PT. Capella Cabang Bangkinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang dan hambatan/kendala implementasi kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar yang diperoleh langsung dari pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai sumber pertama yakni Karyawan PT. Capella cabang Bangkinang dan debitur kredit kendaraan bermotor merek Honda, kemudian dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuesioner.

Hasil Penelitian ini adalah dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bahwa tidak semua asas kebebasan berkontrak terpenuhi. Permasalahan yang timbul dalam penerapan asas kebebasan berkontrak adalah bentuk perjanjian yang telah dibakukan hal tersebut dilakukan oleh PT. Capella cabang Bangkinang untuk menghemat biaya dan waktu. Adanya beberapa pasal dalam perjanjian yang melanggar asas kebebasan berkontrak, walaupun melanggar peraturan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang umum dan menghindari perbuatan debitur yang merugikan PT. Capella cabang Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis perjanjian baku terhadap kredit kendaraan bermotor di PT. Capella cabang Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini, diyakini dan disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan berupa kesalahan di sana – sini akibat keterbatasan penulis, baik dari segi konsep, teori atau yang lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan sangat diharapkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Nazar DZ dan Ibunda Nurhana, Abang-abang Kandungku Uswatul Hasanah S.IP, Msi , Hasanal Bolkiah SE, MM yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a, memberi nasehat-nasehat yang sangat luar biasa baik secara materil maupun moril kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;

Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu *support* yang telah diberikan oleh keluarga besar berikan kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih;
- Bapak Firdaus, SH.MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim,S,Ag.,SH.,M.Hum selaku Sekretaris jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Muslim,S,Ag.,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, fikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi;

Ibuk Musrifah SH.MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan;

Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum;

10. Sahabat – sahabatku Sherly Andriani SH, Villa Oktavia SH, Yulli Suryani SE, Hikmatul Umami SE, Aziza SE, Kiki Hakimah, Ayu Luvtiara dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini;

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, PT.Capella Dinamik Nusantara Cabang Bangkinang yang telah memberikan Izin dan Data kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 20 Juli 2019
Penulis,

SITI HASNAH MUSDALIFAH
NIM.11327200869

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Sejarah singkat Sejarah Bangkinang	14
B. Sejarah PT. Capella Cabang Bangkinang	21
C. Visi dan Misi	23
D. Usaha Jual Beli Sepeda Motor pada PT. Capella.....	23
E. Struktur Organisasi PT. Capella Cabang Bangkinang	25
BAB III TINJUAN KEPUSTAKAAN	27
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	27
1. Pengertian Implementasi	27
2. Tahapan Pembuatan Kebijakan publik	28
3. Implementasi Kebijakan Publik	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	35
1. Pengertian Perjanjian	35
2. Bentuk Perjanjian	36
3. Unsur – unsur Perjanjian	36
4. Sumber – Sumber Perjanjian	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Asas – asas Perjajian	40
6. Syarat – syarat Perjanjian	43
7. Akibat Suatu Perjanjian	45
8. Perjanjian Kredit	46
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Implementasi Perjanjian baku terhadap Kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang	51
B. Pelaksanaan pelanggaran yang terdapat dalam perjanjian baku terhadap kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang	55
C. Bagaimana seharusnya pelaksanaan perjanjian baku di PT.Capella	59

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

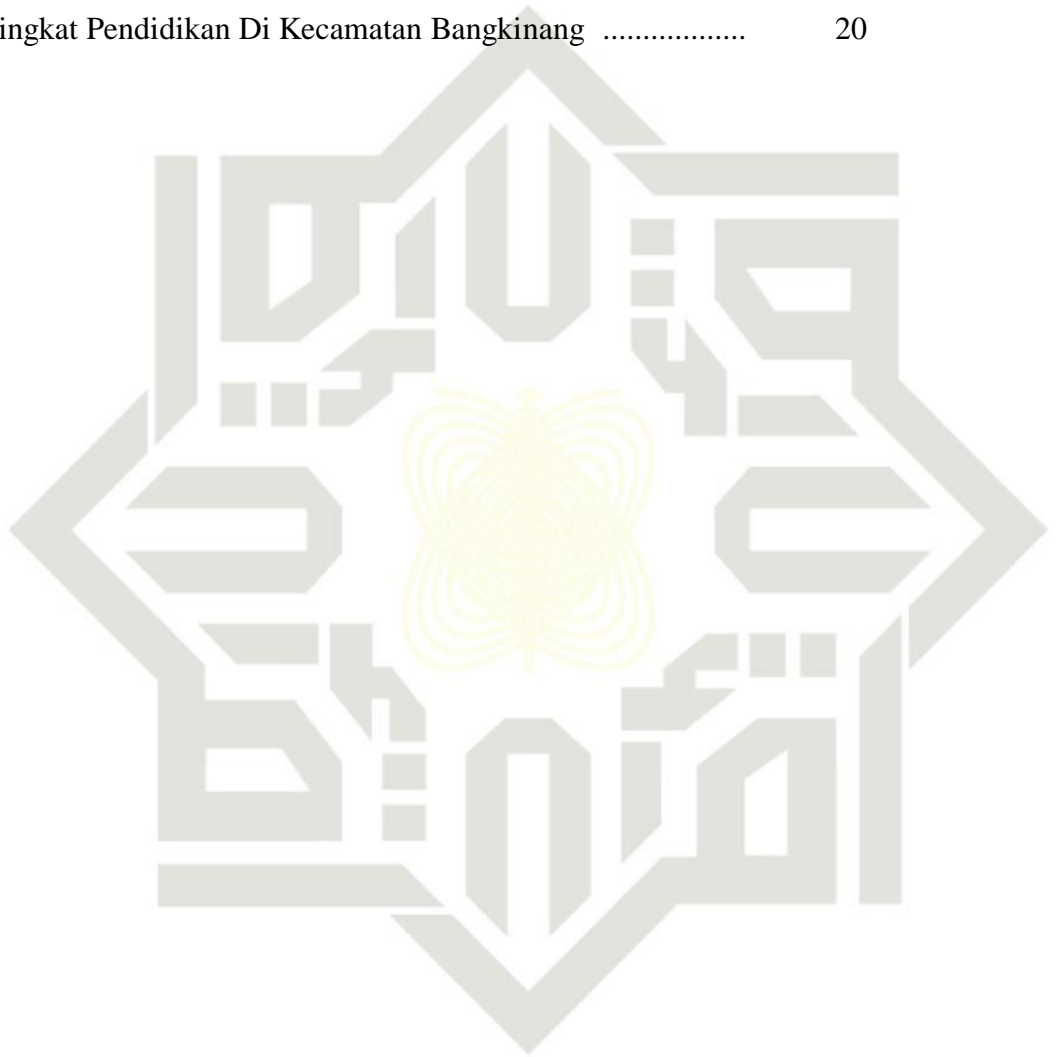


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	9
Tabel II. 1	Kependudukan di Kecamatan Bangkinang	18
Tabel II. 2	Jumlah Penduduk menurut tingkat umur di Bangkinang	19
Tabel II. 3	Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bangkinang	20



UIN SUSKA RIAU

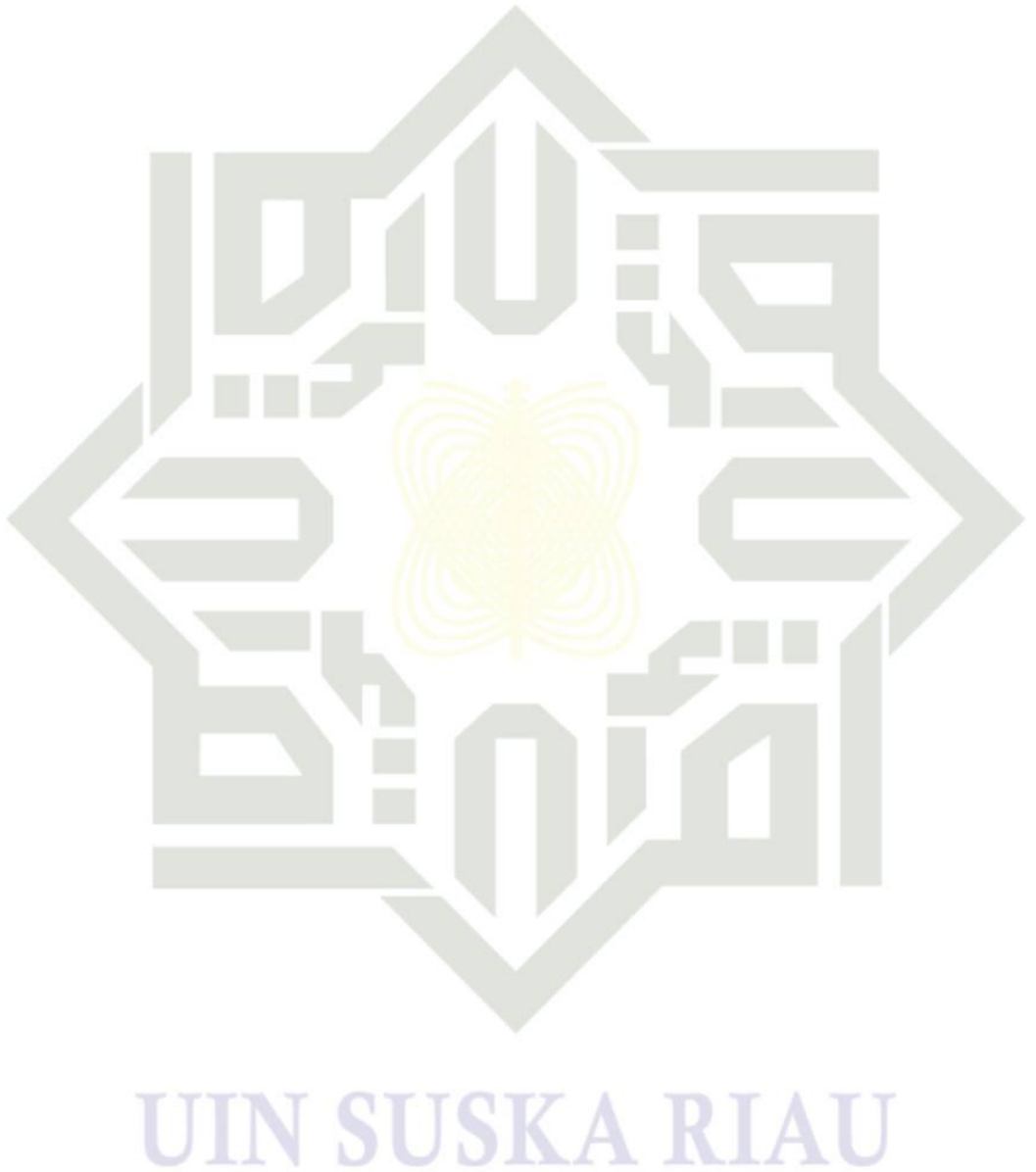


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Batas – batas Wilayah Kecamatan Bangkinang	17
Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT. Capella Cabang Bangkinang	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pelaku usaha dalam memberikan pelayanan konsumen menggunakan perjanjian baku, khususnya dalam jumlah besar mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Menurut Daeng Naja, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak dijamin oleh hukum”.¹

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua orang tersebut disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.²

¹ Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, H.84.

² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.³

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.⁴

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 *juncto* pasal 1320 KUH Perdata. Secara harfiah perjanjian sewa beli dilandasi oleh perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Sewa beli umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula dalam perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak lain. Pihak lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula yang telah

³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Bandung, 2004, H. 44. Bandingkan Ilyas, *Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14, No. 2, 2012.

⁴ Susiana, *Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015, H. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersiapkan dengan resiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.⁵

Dalam perjanjian sewa beli (kredit) melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan. Dalam perikatan dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar KUH Perdata.⁶

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian ini ditujukan untuk membeikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁷

Umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan

⁵ Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

⁶ Firya Oktaviarni, *Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No 2, 2015, H. 107.

⁷ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, H. 135-136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Untuk melindungi konsumen dari ketidakseimbangan posisinya dalam suatu perjanjian, dibentuklah Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK melarang pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian perlu dilihat apakah ketentuan ini dipatuhi atau tidak.⁸

Perjanjian kredit kendaraan bermotor merek Honda di PT. Capella Cabang Bangkinang adalah perjanjian baku dimana klausula – klausula perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT. Capella Cabang Bangkinang bahwa konsumen harus mematuhi segala ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor . ketentuan dan syarat tersebut secara garis besar mengatur tentang risiko yang harus ditanggung konsumen apabila hilang, kewajiban konsumen untuk menyerahkan kembali barang kendaraan bermotor dengan penentuan denda dalam hal konsumen lalai atau terlambat dalam mengembalikan barang, dan biaya pengembalian barang ditanggung oleh konsumen, serta penghentian sewa beli secara sepihak yang dilakukan pelaku usaha tanpa menunggu keputusan hakim apabila pelaku usaha menganggap konsumen telah melakukan kelalaian.

Prinsip the privity of contract menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika

⁸ Firya Oktaviarni, *Op. Cit.*, H. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan “kecil”, maka pelaku usaha dapat beralih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.⁹ Adanya ketidakseimbangan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dimana obyek penelitiannya adalah perjanjian baku yang buat oleh PT. Capella Cabang Bangkinang. Maka berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU TERHADAP KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MEREK HONDA DI PT. CAPELLA CABANG BANGKINANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

⁹ Milawartati T . Ruslan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, E Jurnal Katalogis, V 4, No. 10, 2016, H. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar tidak menyimpang dari judul penelitian, maka penelitian menetapkan batasan masalah hanya pada implementasi perjanjian baku terhadap kredit kendaraan bermotor berdasarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang perlindungan konsumen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian baku yang terdapat pada PT. Capella?
2. Bagaimana pelaksanaan pelanggaran yang terdapat di PT. Capella?
3. Bagaimana seharusnya Pelaksanaan Perjanjian Baku di PT. Capella Cabang Bangkinang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian baku yang terdapat pada PT. Capella Cabang Bangkinang.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pelanggaran yang terdapat dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana seharusnya pelaksanaan perjanjian di PT. Capella Cabang Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya.
- b. Memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan tentang perjanjian baku terhadap kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang berdasarkan pasal 18 UUPK.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data¹¹ primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung¹² dari PT. Capella Cabang Bangkinang, yang dilakukan baik melalui Observasi (pengamatan), penyebaran angket maupun wawancara.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menguraikan dan menggambarkan secara jelas bagaimana

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2012),

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta CV, 2017), h.70.

¹²*Ibid*, h.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dan pelanggaran perjanjian baku terhadap kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella Cabang Bangkinang berdasarkan pasal 18 UUPK

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Capella Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan:

- a. Karena Bangkinang pada umumnya telah menjadi sebuah wilayah yang cukup diperhitungkan dan termasuk salah daerah yang laju perekonomian dan pertumbuhan penduduknya cepat meningkat, sehingga masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak sudah sering terjadi.
- b. Karena semakin seringnya masalah tentang perjanjian yang sering dilanggar walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya dikalangan masyarakat, sehingga menimbulkan masalah baru yang terjadi dikalangan masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Debitur dan Kreditur di PT. Capella Cabang Bangkinang. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Analisis Perjanjian Baku Terhadap Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Capella Cabang Bangkinang Berdasarkan UUPK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama¹³. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *Total Sampling* yaitu pengambilan data secara keseluruhan didalam sebuah populasi sebagai anggota sampel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini :

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pimpinan Kredit PT. Capella	1	1	100 %
2.	Pihak PT. Capella yang mengelola bagian kredit	2	2	100%
3.	Debitur Kredit kendaraan motor di PT. Capella	1	1	100%
Total		4	4	

Berdasarkan Tabel diatas dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik proposive sampling, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁴

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian¹⁵, dalam hal ini peneliti memperoleh data

¹³ Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press 2009) h.18.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009), h.104

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press,2010), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari PT. Capella Cabang Bangkinang dan Debitur Kredit kendaraan bermotor di PT. Capella Cabang Bangkinang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan¹⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.¹⁷
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku – buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

¹⁶Op.Cit, Zainuddin Ali, h. 106.

¹⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabet, 2014), h.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yakni mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang teliti, menguraikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.¹⁸ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah PT. Capella Cabang Bangkinang
- B. Profil Perusahaan

¹⁸ *Ibid*, h. 145-146.

¹⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Visi dan Misi
- D. Struktur Organisasi

BAB III : TINJAUAN PUSTAKAAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang

A. Tinjauan Umum Tentang Analisis

1. Pengertian Analisis
2. Tahapan Pembuatan Kebijakan publik
3. Implementasi Kebijakan Publik

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Bentuk Perjanjian
3. Unsur – unsur Perjanjian
4. Sumber – sumber Perjanjian
5. Asas – asas Perjanjian
6. Syarat – syarat Perjanjian
7. Akibat Suatu Perjanjian

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang

- #### **A. Implementasi Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Merek Honda di Capella Cabang Bangkinang.**

B. Faktor - faktor kendala dalam Implementasi Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Merek Honda di Capella Cabang Bangkinang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak dan Keadaan Geografis Kecamatan Bangkinang

1. Sejarah singkat Kecamatan Bangkinang

Kecamatan Bangkinang merupakan Kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 terpisah dari Kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang Kota. Pemecahan Kecamatan ini berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja. Pemekaran Kecamatan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat Bangkinang inilah yang benar-benar warga Bangkinang Asli atau penduduk yang berdarah Bangkinang dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendatang kecuali untuk desa eks transmigrasi, sedangkan warga Bangkinang Kota kebanyakan adalah penduduk pendatang dari luar Bangkinang.²⁰

2. Kondisi Wilayah

Kecamatan Bangkinang terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 00.2000 Lintang Utara dan 100.5000 Bujur Timur sampai 101.0500 Bujur Timur dan + .60 mdpl meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar beberapa sungai kecil yang ikut mengairi

²⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/8109/3/.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Bangkinang yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Tanah yang subur menjadikan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi komoditi utama warga masyarakatnya.

3. Keadaan Tanah

Dilihat dari letak dan keadaan geografis Bangkinang sebagian besar penduduknya bergerak dalam struktur pertanian, terutama dalam sub sektor dengan komoditi utama tanaman karet.²¹

4. Keadaan Iklim

Kondisi tanah yang berbukit-bukit mengakibatkan daerah ini dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata antara 260 C sampai dengan 290C. Sementara itu curah hujan dapat dikatakan cukup tinggi.

5. Luas Wilayah

Terdapat 2 (dua) kelurahan dan 6 (enam) desa definitif dan 1 (satu) desa Depenitif yaitu Desa Binuang di Kecamatan Bangkinang dengan luas Kecamatan keseluruhan 13.088 Ha.

Adapun luas masing-masing Desa dan Kelurahan yaitu:

- a. Desa Pulau Lawas : 875 Ha
- b. Desa Muara Uwai : 2.312 Ha
- c. Kelurahan Pulau : 603 Ha
- d. Kelurahan Pasir Sialang : 2.463 Ha
- e. Desa Bukit sembilan : 816 Ha

²¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Desa Laboi Jaya : 2.444 Ha
- g. Desa Suka Maju : 1.515 Ha
- h. Desa Bukit Payung : 1.640 Ha
- i. Desa Binuang : 420 Ha

6. Keadaan Alam

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang adalah dataran rendah dan berbukit yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, karet, dan padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Bangkinang mempunyai galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga memungkinkan masyarakat beternak kerbau yang dilepas di rawa, karena semakin sempitnya daerah tempat kerbau mencari makan sehingga tidak menjadi hama yang merusak tanaman padi warga.

7. Batas-batas Wilayah

Wilayah Kecamatan bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 masing-masing berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Solo .²²
8. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian
- a. Kependudukan Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak di Bangkinang adalah pada desa Pasir Sialang dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah desa Bukit Sembilan.



Gambar I.1 Batas-Batas Wilayah Kecamatan Bangkinang

²² Dokumen Kecamatan Bangkinang tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Kependudukan di Kecamatan Bangkinang

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	Pulau Lawas	2.901 jiwa	727
2.	Muara Uwai	3.511 Jiwa	765
3.	Pasir Sialang	8.034 jiwa	2.18
4.	Pulau	3.078 jiwa	772
5.	Suka mulya	2.373 jiwa	597
6.	Laboi jaya	2.654 jiwa	720
7.	Bukit Payung	2.494 Jiwa	619
8.	Bukit Sembilan	1.604 Jiwa	383
9	Binuang	1.707 Jiwa	400
	Jumlah	28.356 Jiwa	7.201 KK

Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi penduduk Kecamatan Bangkinang berdasarkan desa, Pulau Lawas sebanyak 2.091 jiwa atau terdiri dari 727 KK, jumlah penduduk di desa Muara Uwai sebanyak 3.511 jiwa atau terdiri dari 765 KK, jumlah penduduk di desa Pasir Sialang sebanyak 8.034 jiwa atau terdiri dari 2.218 KK, jumlah penduduk di desa Pulau sebanyak 3.078 jiwa atau terdiri dari 772 KK, jumlah penduduk di desa Suka Mulya sebanyak 2.373 jiwa atau terdiri dari 597 KK, jumlah penduduk di desa Laboy Jaya sebanyak 2.654 jiwa atau terdiri 720 KK, jumlah penduduk di desa Bukit Payung sebanyak 2.494 jiwa atau terdiri dari 619 KK, jumlah penduduk di desa Bukit Sembilan sebanyak 1.604 jiwa atau terdiri dari 383 KK, jumlah penduduk di desa Binuang sebanyak 1.707 jiwa atau terdiri dari 400 KK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk menurut tingkat umur di Bangkinang

No.	Umur	Jumlah	%
1.	00-10	1.325	4,77
2.	11-12	3.354	12,49
3.	21-30	6.450	22,75
4.	31-40	9.922	34,99
5.	41-50	4.821	17,00
6.	51 tahun ke atas	2.268	8,00
	Jumlah	28.356	100

Sumber data : Kantor Camat Bangkinang tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak produktif berjumlah 1.352 jiwa (4,77 %), yaitu penduduk yang berumur antara 00-10 tahun, sedangkan penduduk yang kurang produktif berjumlah 3.543 jiwa (12,49 %), yaitu penduduk yang berumur antara 11-20 tahun, dan jumlah penduduk yang usia produktif berjumlah 23.461 jiwa (82,74 %), yaitu penduduk yang berumur antara 21-51 tahun ke atas.

a. Mata Pencahari

- 1) Pertani
- 2) Wiraswasta
- 3) Buruh
- 4) Pedagang
- 5) Tukang
- 6) PNS/ABRI
- 7) Tidak bekerja

b. Tingkat Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bangkinang yang berjumlah 28.356 jiwa sebahagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP,SLTA dan sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bangkinang

Tidak Sekolah	TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan tinggi
2.836 (10%)	567 (2%)	18.431 (65%)	1.985 (7%)	3.119 (11%)	1.418 (5%)

Sumber data : Kantor Cabang Bangkinang 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Bangkinang yang tidak sekolah sebanyak 2.836 orang atau sebesar 10 %, yang TK sebanyak 567 orang atau sebesar 2 %, yang SD sebanyak 18.431 orang atau sebesar 65 %, yang SLTP sebanyak 1.985 orang atau sebesar 7 %, yang SLTA sebanyak 3.119 orang atau sebesar 11 % , dan Perguruan Tinggi sebanyak 1.418 atau sebesar 5%.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Bangkinang masih belum cukup tinggi sehingga harus lebih ditingkatkan lagi karena bagaimana juga tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Dan dengan banyaknya penduduk yang berpendidikan tinggi ini maka akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan penduduk lainnya sehingga akan tercipta pembangunan serta dapat memacu pertumbuhan ekonmi daerah yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Agama dan Budaya Masyarakat

Dalam sektor keagamaan penduduk Bangkinang mayoritas seluruhnya beragama Islam. Tempat-tempat peribadatan cukup banyak, seperti Mesjid dan Mushalla. Mesjid berjumlah 30 dan Mushalla 62. Dalam hubungan sehari-hari adat-istiadat memainkan pengaruh yang sangat penting sekali. Adat-istiadat di daerah ini hampir sama dengan adat istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukkan dengan garis keturunan yang menganut sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Demikian juga dengan kesenian dan bahasanya yang sangat mirip dengan bahasa dan kesenian di daerah Minangkabau.

B. Sejarah PT. Capella

Pada awal tahun 1971 “CAPELLA” didirikan untuk pemasaran sepeda motor Honda di Palembang, usaha ini kemudian berkembang menjadi PT CAPELLA MEDAN (*Holding Company*) didirikan pada tanggal 19 Oktober 1973, dengan kantor pusat berkedudukan di Jalan Rahmadsyah No. 55-57 Medan. Seiring dengan perkembangan bisnis otomotif di Indonesia, PT.CAPELLA MEDAN dipercayakan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL untuk mengembangkan usahanya yang lebih jauh yaitu penjualan mobil seperti DAIHATSU, BMW, ISUZU, PEUGEOT, NISSAN DIESEL TRAKTOR PERTANIAN KUBOTA dan berbagai jenis suku cadang.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, maka pada tanggal 13 November 1986 PT.CAPELLA DINAMIK NUSANTARA didirikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kantor pusat berkedudukan di Medan, dimana sebelumnya merupakan Honda DIVISI pada PT. CAPELLA MEDAN.

Dengan demikian PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. CAPELLA MEDAN. Khusus untuk menangani pemasaran sepeda motor Honda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Riau. Selain menyalurkan sepeda motor Honda melalui jaringan dealer, PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA juga menjual sepeda motor Honda langsung ke konsumen, Costumer Group, Instansi melalui kantor cabang/ kantor pemasaran.

Dengan pilihan tipe dan model yang lengkap, jaringan purna jual atau yang dikenal sebagai AHASS (ASTRA HONDA AUTHORIZES SERVICE STATION) siap untuk memberikan pelayanan servis yang terbaik kepada konsumen dengan mekanik-mekanik yang telah terlatih dan menempuh pendidikan formal sebagai mekanik ASTRA Honda, Suku Cadang asli Honda juga mudah didapatkan di outlet/part shop. Dealer suku cadang asli khusus honda yaitu HEPS (HONDA EXCLUSIVE PART SHOP) juga diciptakan untuk memudahkan konsumen mendapatkan suku cadang yang terjamin keasliannya.

PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA menitikberatkan kepada kepuasan pelanggan dengan *design Showroom* Standar modern, kebersihan yang terjaga dan pelayanan yang ramah pada setiap counter penjualan. Untuk mengakomodasikan kebutuhan konsumen sepeda motor honda secara kredit, kantor cabang/ kantor pemasaran, juga jaringan dealer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami melayani penjualan kredit dengan suku bunga yang *kompetitif*, biaya administrasi yang rendah dan pelayanan survei yang cepat melalui kredit dana sendiri dan lembaga keuangan. Dengan memiliki keunggulan komparatif yang tidak tertandingi oleh produk sepeda motor lainnya, Honda tetap menjadi produk sepeda motor yang paling banyak diminati oleh konsumen Indonesia.

Visi dan Misi PT. Capella Cabang Bangkinang

1. Visi PT. Capella adalah Menjadi pemimpin pasar sepeda motor dalam distribusi, penjualan dan pelayanan purna jual
2. Misi dari PT. Capella adalah menguasai wilayah pemasaran sehingga dapat memaksimalkan penjualan produk, menguasai pasar penjualan, meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen agar dapat mencapai visi dari PT. Capella.

Slogan Perusahaan

S (sistem manajemen yang efisien dan efektif)

P (prioritas kepuasan konsumen)

I (integritas)

R (responsibilitas)

I (inovasi untuk terus belajar dan berkembang)

T (terbaik dalam bidangnya)

Usaha Jual Beli Sepeda Motor pada PT. Capella

PT. Capella yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Capella Medan. Khusus untuk menangani pemasaran sepeda motor Honda di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Riau

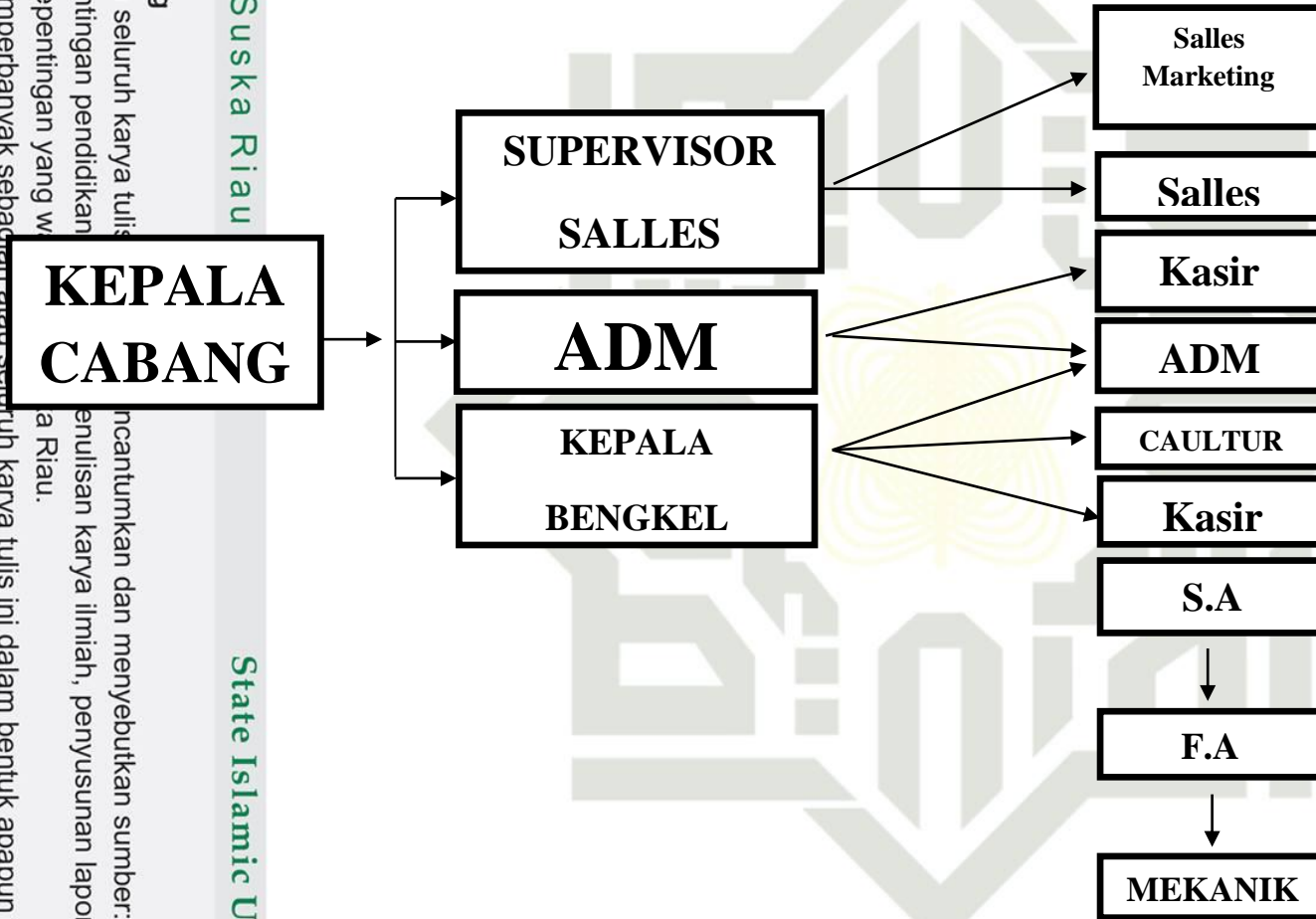
Selain menyalurkan Sepeda Motor Honda melalui jaringan dealer, PT. Capella juga menjual sepeda motor Honda langsung ke Konsumen, Customer Group, Instansi melalui kantor cabang/kantor pemasaran, atau pun pada chanel Honda di PT. Capella. Untuk mengakomodasikan kebutuhan konsumen sepeda motor Honda secara kredit, Kantor Cabang / Kantor Pemasaran, juga pada chanel honda tend PT. Capella melayani penjualan kredit dengan biaya administrasi yang rendah dan pelayanan survei yang cepat melalui kredit dana sendiri dan lembaga keuangan.

Saat ini PT. Capella telah memiliki empat chanel honda tend yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di sekitar Bangkinang. Sepeti Randu Motor yang berada di Desa Gunung Sari, Budi Motor yang berada di Desa Suka Maju, Elga Motor yang berada di desa Sungai Kuning, dan Chanel Honda Tend yang ada di Desa Sungai Buluh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Struktur Organisasi PT. Capella



Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT. Capella

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan sebuah tugas dan kegiatan, hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap bagian departemen atas pekerjaan yang dibebankan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi PT. Capella

1. Kepala Cabang
2. *Supervisor Salles*
 - a. Salles Markerting
 - b. Salles
3. ADM Kepala
 - a. Kasir
 - b. ADM
4. Kepala Bengkel
 - a. ADM
 - b. Caultur Part
 - c. Kasir
5. S.A
6. F.A
7. Mekanik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik didalam ilmu politik. meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi Negara. artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Negara dengan mempertimbangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa aspek. secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholders* lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.²³

2. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan masalah public yang akan diperoleh, tidak semua masalah akan menjadi masalah public. suatu masalah akan menjadi masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakkan kearah tindakan tersebut.²⁴

Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para pejabat yang dipilih, menempatkan masalah public tersebut pada agenda kebijakan. pada tahap ini, banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan ada juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama.²⁵

b. Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.

²³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) . h. 1.

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta:CAPS,2012), h.73

²⁵ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, untuk menentukan alternative kebijakan yang dipilih melalui dukungan dari mayoritas legislative, consensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan yang telah dibuat menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi berkaitan dengan beragam kegiatan untuk merealisasikan program. para eksekutif mengatur cara untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. tahap ini dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. seperti yang dikatakan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan. melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut.²⁶

²⁶ *Ibid*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. implementasi kebijakan bermuara kepada *output*, baik berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.²⁷ Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

²⁷ Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, h. 74 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

2.1 Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- b. Derajat perubahan yang diinginkan
- c. Kedudukan pembuat kebijakan
- d. (Siapa) pelaksana program
- e. Sumber daya yang dihasilkan

2.1.1 Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu :

- 1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- 2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- 3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Jampersal secara lebih mendalam.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Sehubungan dengan uraian di atas, Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur (si berpiutang), dan/atau sebagai debitur (si berutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undangan dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

2. Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa perjanjian itu.²⁸

3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Unsur *Essensilia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang hala”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensilia*.

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkarkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*).

Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata:

“biaya penyerahan dipukul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipukul oleh si pembeli ”.

Undang-undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (penjual dan pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam undang-undang itu. begitu juga kewajiban si penjual menjamin (*vrijwaren*) aman hukum dan cacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur ini sama halnya dengan unsure *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri tidak mengatur tentang hal itu. contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.²⁹

4. Sumber-sumber perjanjian

Sumber-sumber perikatan dalam hukum Indonesia ada dua, yaitu

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata,

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (Perjanjian), maupun karena undang-undang. Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.”³⁰

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajibannya didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang, seperti hak dan kewajiban yang timbul antara ayah dan anak dalam hal nafkah, juga beberapa hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan 625 KUH Perdata, hubungan yang muncul dari kewajiban pemeliharaan .

Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan

²⁹ *Ibid.*, h. 44

³⁰ Pasal 1233 KUHPerdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan dibedakan menjadi dua

- a. Perbuatan sesuai hukum
- b. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini apabila dilakukan oleh seseorang, atas ketentuan undang-undang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain tiap-tiap perbuatan menimbulkan kewajiban atas pelaku perbuatan yang karena kesalahannya timbul kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian.

Sumber-sumber yang melahirkan perikatan itu meliputi sebagai berikut :

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang, yang dibedakan menjadi
 - 1) Undang-undang saja
 - 2) Undang – undang berkaitan dengan perbuatan orang, yang dibedakan lagi
 - a) Perbuatan sesuai hukum
 - b) Perbuatan melawan hukum³¹

³¹Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Asas-asas Perjanjian

a. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Konsensualisme mempunyai korelasi dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan kontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

Kebebasan kontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embroil lahir dizaman yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya, dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan kontrak” dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualism member peluang yang luas bagi golongan yang lemah. dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Pada akhir abad XIX akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualism mulai memudar. paham ini mulai tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi mutlak, tetapi diberi arti relative dan dikaitkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum. mulailah perjanjian diawasi pemerintah sebaai pengemban kepentingan umum dan menjaga keseimbangan individu dan kepentinan masyarakat. melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah, sehingga terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mebuatnya tetpai ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut.

- a. Adanya keadaan memaksa (*ocermacht* atau *force majeure*)
- b. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa” Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.³²
- b. Asas konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya consensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang

³² *Ibid*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek perjanjian. apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).

1) Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa ,pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

2) Asas *Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalhnya perjanjian untuk pihak ketiga.³³

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umunya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

6. Syarat-syarat perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikat diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.³⁴

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya, 2006), h. 93

³⁴ Pasal 1329 KUH Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan memuat hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. adapun orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata)
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdata contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

7. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut :

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1138 ayat (1) KUH Perdata)
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdata)
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata)
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, pasal 1571, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata)
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara), jika iktikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara). hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KuhPerdata)
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau sebaian dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tesebut menjadi batal.

8. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur seperti diatas, maka perjanjian ktedit merupakan perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang, karena itu peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian klredit adalah KUHPerdara sebagai peraturan umumnya dan undang-undang perbankan sebagai peraturan khususnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas suatu kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. ini berarti suatu lembaga kredit akan memberikan kalau ia yakin baetul bahwa penerima kredit akan mengembalikannya pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.³⁵

Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

1. Kontrak Baku³⁶

Perjanjian kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.

Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakuka kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat sevara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak poisis tawarnya seimbanh antara satu dengan yang lain.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemaha biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-

³⁵ Thomas Suyanto , *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2003), h. 14

³⁶ Ahmadi Mlru, *Hukum Kontrak dan Perncangan Kontrak* (PT Raja Grafindo:Jakarta, 2008), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Karena yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.³⁷

2. Klausul Eksonerasi

Rijke mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada

³⁷ *Ibid*, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

3. Penyalahgunaan Keadaan

Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Meriam Darus Badrulizman, perjanjian baku dengan klausul eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (Kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relative kuat daripada debitur.
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bantuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Meriam Darus Badrul zaman di atas menempatkan kreditur selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan, kreditor tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada debitur karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditor, dan justru debiturlah yang merancang kontrak baku. Dengan demikian, pendapat diatas tidak selamanya dapat dibenarkan.

Selain itu, salah satu ciri kontrak baku yang dikemukakan oleh Meriam Darus Badrul Izman, yaitu debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan karena kontrak baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang kontrak baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan klausul yang pada umumnya tidak dapat ditawarkan adalah klausul yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian.

Berdasarkan alasan diatas, kontrak baku yang mengandung klasul eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang poisinya lebih kuat.
- 2) Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dari perjanjian.
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- 4) Bentuknya tertulis
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi perjanjian baku terhadap kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang calon debitur harus memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh PT. Capella Cabang Bangkinang, antara lain tentang kesepakatan dalam perjanjian yang mana perjanjian telah ditetapkan oleh PT. Capella Cabang Bangkinang. Akan tetapi dalam pelaksanaan unsur – unsur asas kebebasan berkontrak yang dilaksanakan tidak seluruhnya terpenuhi bahkan melanggar akan peraturan yang lain, yaitu tentang tidak relevannya Pasal 1337 KUHPerdara tentang melanggar ketentuan undang – undang yang dimaksud adalah Pasal 18 ayat (1) huruf d undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yaitu adanya klausul baku dalam perjanjian barang secara angsuran kredit kendaraan bermotor merek Honda di Capella cabang Bangkinang.
2. Didalam perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Capella terdapat pelanggaran yang mana masih mengandung unsur klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, dan Pasal 1339 KUH Perdata. Kemudian, bertentangan juga dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan UUPK, khususnya dalam Pasal 4 UUPK, Pasal 7 UUPK, dan 18 ayat (1), dan ayat (2) UUPK. Dengan demikian, klausula tersebut adalah cacat hukum, dan dapat dinyatakan bahwa sedari awal tidak pernah ada hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan harus ditinjau dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk isi perjanjian baku yang satu ini, kreditur sudah melakukan tindakan diskriminatif terhadap konsumen. Konsumen (debitur) diwajibkan setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK sudah begitu jelas begitu jelas diterangkan bahwa pihak pelaku usaha tidak boleh membuat atau menerapkan perjanjian baku yang isinya mengandung klausula eksonerasi. Klausula ini dibuat untuk mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pihak pelaku usaha (kreditur) dialihkan menjadi tanggung jawab pihak debitur (konsumen).

Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat yang berbeda, yang *pertama*, perjanjian baku bukan merupakan perjanjian yang dikarenakan ketidak seimbangan kedudukan dalam perjanjian. Yang *kedua*, perjanjian baku merupakan perjanjian karena perjanjian yang sah dikarenakan pihak debitur telah menyetujui isi perjanjiannya. Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan PT. Capella Cabang Bangkinang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. Capella memberi kesempatan kepada pihak calon debitur/kosumen untuk ikut dalam pembuatan perjanjiannya yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak.
2. Kepada PT. Capella Cabang Bangkinang lebih selektif dalam melakukan pelayanan terhadap debitur, agar debitur lebih mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
3. Untuk debitur yang ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor merek honda dalam perjanjian kreditnya harus meluangkan waktu untuk membaca isi perjanjian yang mana itu adalah hal yang mengakibatkan hak dan kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Citra Aditya, 2006).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (PT Raja Grafindo:Jakarta, 2008)
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010).
- Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta:CAPS,2012),
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009).
- Dokumen kecamatan bangkinang tahun 2018
- Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua
- Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*,
- Herlien Budiono, 1993, *kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang Dalam Suatu Perjanjian*, Jakarta : Media Notariat.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/8109/3/.pdf>
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta CV, 2017).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Pasal 1233 KUHPerdara
- Pasal 1329 KUH Perdata.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumsi Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Siddiq, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Word Press.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi* (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2010) .

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2012).

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabet, 2014).

Sutan Renny Sjahdeini, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta:institut Bankir Indonesia, 1993).

Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010

Thomas Suyanto , *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2003).

Wikipedia Bahasa indonesia *Pengertian Kotrak dan Perjanjian*.

Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, H.84.

Ibid.

Herlien Budiono, *Op. Cit*,h .24.

Rita Anesta (Marketing PT.Capella cabang Bangkinang), *wawancara* 14 Mei 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA KEPADA PIHAK PT. CAPELLA CABANG BANGKINANG

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Pasal 1233 KUH Perdata ?

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang isi dari Pasal 1330 KUHPerdata ?

Bagaimana prosedur permohonan sampai dengan pencairan fasilitas kredit di PT. Capella cabang Bangkinang ?

Persedur permohonan

4. Apa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur saat pembelian kendaraan bermotor merek Honda ?

5. Apa saja aspek yang harus dilihat dari debitur ketika debitur melakukan perjanjian kredit di PT. Capella cabang Bangkinang ?

6. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit di PT. Capella cabang Bangkinang?

Apakah pernah ada debitur yang keberatan atas perjanjian kredit yang diberikan oleh PT. Capella cabang Bangkinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA KEPADA PIHAK DEBITUR KREDIT

PT. CAPELLA CABANG BANGKINANG

Identitas Debitur ?

Berapa lama perjanjian kredit kendaraan motor merek Honda yang dibeli ?

Bagaimana cara pembayaran yang ditetapkan oleh PT. Capella cabang Bangkinang dalam perjanjian kredit di PT. Capella Cabang Bangkinang ?

Apa saja persyaratan yang harus diserahkan ketika mengajukan kredit kendaraan bermotor merek Honda di PT. Capella cabang Bangkinang ?

5. Apa alasan Bapak/Ibu memilih pembelian kendaraan bermotor merek Honda di PT. Capella cabang Bangkinang ?

6. Apakah Bapak/Ibu sebagai debitur mengetahui tentang Pasal 1233 KUH Perdata ?

7. Apakah Bapak/Ibu sebagai debitur mengetahui tentang isi dari Pasal 1330 KUHPerdata ?



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SITI HASNAH MUSDALIFAH
 NIM : 11327200869
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul : IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAKU TERHADAP KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. CAPELLA CABANG BANGKINANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembimbing : Muslim, S.Ag., M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2020,

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Siti Hasnah Musdalifah** lahir pada tanggal 25 April 1995 di Pekanbaru. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan **Nazar DZ** dan **Nurhana**.

Penulis memulai pendidikan formal Taman Kanak-Kanak di TK Babusalam Pekanbaru pada tahun 2000-2001, kemudian Sekolah Dasar di SDN 032 Pekanbaru pada tahun 2001-2007, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 21 Pekanbaru pada tahun 2007-2010, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 01 Pekanbaru pada tahun 2010-2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2013-2019. Penulis mengambil Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Law Firm SM TUA MANIK Pekanbaru dan penulis juga telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata di Desa Kampung Panjang Air Tiris Kabupaten Kampar. Pada tanggal 6 April 2018 penulis mengikuti sidang akhir munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (IPK akhir 3,37) dan berhak menyandang gelar Strata Satu Ilmu Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.